

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sudan Selatan muncul pada tahun 2011 sebagai negara yang paling baru di dunia. Negara Sudan Selatan resmi menjadi negara yang berdaulat setelah adanya perjanjian damai (Compromise Peace Agreement) antara Sudan People's Liberation Army (SPLA) atau gerakan pembebasan rakyat Sudan dengan Pemerintah Sudan untuk mengakhiri perang selama 40 tahun. Namun setelah kemerdekaan, Sudan Selatan harus menghadapi permasalahan baru di tingkat internal negara. Dua tahun setelah kemerdekaan Sudan Selatan tepatnya pada desember 2013 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam gerakan Sudan' People Liberation Movement- In Opposition SPLM-IO yang melawan pemerintahan presiden Salva Kiir.

Salah satu negara yang dirugikan dengan adanya perang sipil ini adalah negara Tiongkok. Tiongkok memiliki investasi yang bernilai tinggi di Sudan Selatan. Salah satu investasi Tiongkok di Sudan Selatan adalah perusahaan minyak China National Petroleum Corp. Adanya perang sipil menghambat penjualan dan produksi minyak sehingga Tiongkok harus melakukan tindakan untuk menghentikan perang sipil di Sudan Selatan.

Hubungan Tiongkok dengan Sudan Selatan telah berjalan bahkan sejak Sudan Selatan belum menjadi negara yang merdeka. Potensi yang dimiliki oleh Sudan Selatan dalam bidang sumber daya alam dan letaknya yang strategis di

membuat negara Tiongkok memiliki ketertarikan tersendiri dalam menjalin kerjasama dengan Sudan Selatan. Konflik Sipil di Sudan Selatan telah menarik perhatian Tiongkok untuk berperan aktif dan menjadi aktor sentral dalam upaya perdamaian. Keikutsertaan Tiongkok pada konflik sipil ini merupakan sebuah transformasi kebijakan Tiongkok yang sebelumnya sangat kaku. Transformasi kebijakan luar negeri yang proaktif dalam proses perdamaian ini telah dimulai sejak konflik sipil di Sudan dan berlanjut ke kawasan Afrika Sub-Sahara. ini telah menjadi studi kasus yang penting dalam evolusi kebijakan luar negeri Tiongkok secara global. Pandangan mengenai peran besar Tiongkok di Sudan Selatan telah ada sebelum konflik sipil meletus pada tahun 2013. Salah satu kajian mengenai analisis peran Tiongkok ialah Sudan Selatan sebagai tempat uji coba untuk diplomasi proaktif. Bahkan telah diperdebatkan bahwa peran Tiongkok di Sudan Selatan saat ini akan menjadi gambaran bagaimana hubungan Tiongkok di masa depan dengan negara-negara di kawasan Afrika Sub Sahara. Hal ini terlihat dalam pendapat beberapa ahli bahwa Tiongkok menggunakan pendekatan yang lebih tegas untuk melindungi kepentingannya di Sudan Selatan akan menjadi citra baru Tiongkok di sistem internasional.



]Adapun peran serta Tiongkok di konflik sipil Sudan Selatan adalah sebagai Third Party Intervener dalam upaya menyelesaikan menjadi mediator atau penengah dalam konflik tersebut. Ini merupakan hal yang baru bagi Tiongkok dimana sebelumnya Tiongkok belum pernah menangani kasus konflik sipil yang berfokus pada proses perdamaian. Tindakan Yang dilakukan Tiongkok di Sudan selatan dapat dilihat dari model contingency yang merupakan bagian dari Third Party Intervention.

Model contingency bertujuan untuk mengidentifikasi empat tahap dalam eskalasi konflik pada third party intervention yakni Discussion, Polarisation Segregation, Destruction Tahapan eskalasi tersebut dipengaruhi oleh sifat komunikasi dan interaksi antara para pihak, persepsi pihak-pihak terhadap pihak lain dan hubungan keberpihakan. Intervener nantinya akan melihat kondisi konflik berdasarkan kondisi konflik, nantinya intervener akan mengidentifikasi tahapan atau tahapan mana yang akan diambil dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut.



Dari data yang didapat oleh peneliti. Praktik intervensi yang dilakukan oleh Tiongkok pada konflik sipil di Sudan Selatan mengalami keberhasilan namun sebelum itu Tiongkok mengupayakan tindakan intervensi yang tidak disarankan oleh model contingency. Hal ini seperti yang dijelaskan diatas bahwa model contingency memberikan model eskalasi konflik dimana menghubungkan tindakan intervensi yang sesuai dengan kondisi konflik yang ada. Sebagai negara baru yang melakukan intervensi dalam mengupayakan peacemaking hal ini tentunya memerlukan pengalaman-pengalaman yang didapat selama mengadakan proses perdamaian. Hal ini dapat dilihat pada awal Tiongkok mengintervensi Sudan Selatan. Tiongkok menggunakan tipe-tipe intervensi yang berfokus pada proses dan minim terhadap kontrol keputusan. Tiongkok mengupayakan negosiasi ketika tingkatan eskalasi konflik Discussion. Namun upaya Tiongkok mengalami kegagalan dan situasi konflik beralih pada tingkatan Destruction atau tingkatan kehancuran dimana kondisi terendah konflik dengan penggunaan kekerasan dari kedua belah pihak. Pada kondisi yang demikian seharusnya intervener mengambil tindakan intervensi dengan jenis intervensi peacekeeping dimana bertujuan untuk

mengontrol kekerasan yang terjadi serta mendorong kestabilan pada kondisi konflik sehingga intervener dapat mengusahakan kembali konsultasi atau arbitrase sehingga dapat mendorong kedua belah pihak menyetujui gencatan senjata atau mendorong kedua belah pihak menyetujui perdamaian. Hal inilah yang disarankan oleh model contingency. Namun dalam prakteknya Tiongkok tidak melakukan hal demikian. Ketika konflik telah memasuki tingkatan Destruction, Tiongkok melakukan intervensi berupa mediasi dan konsultasi hal ini membuat kedua belah pihak menandatangani gencatan senjata namun perjanjian gencatan senjata tersebut tidak bertahan lama. Hal ini disebabkan oleh ketika tingkatan telah memasuki tingkatan terakhir dimana penggunaan senjata maksimal maka yang harus dilakukan intervener adalah mengendalikan kekerasan terlebih dahulu, kemudian barulah mendorong kedua belah pihak mengadakan konsultasi dan arbitrase.

Tindakan Tiongkok selanjutnya juga tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh model contingency, sehingga perjanjian gencatan senjata juga tidak bertahan lama seperti yang diusahakan oleh Tiongkok sebelumnya. barulah pada tahun 2015 Tiongkok mulai melakukan intervensi yang bersifat peacekeeping dimana Tiongkok mengirimkan pasukan penjaga perdamaian dan mulai mengontrol kekerasan yang terjadi di konflik. Kemudian ketika kondisi memungkinkan untuk melanjutkan proses perdamaian, Tiongkok mulai mendorong kedua belah pihak untuk melakukan konsultasi khusus untuk menganalisis permasalahan kedua belah pihak dalam konflik sipil ini. Kemudian upaya-upaya Tiongkok juga didukung oleh IGAD+ mengupayakan kembali mediasi dan berhasil membuat kedua belah pihak yang berseteru menandatangani

gencatan senjata yang lebih permanen. Tindakan intervensi Tiongkok yang dimulai dari adanya intervensi peacekeeping merupakan tindakan yang sesuai dengan apa yang harus dilakukan intervensi dalam intervensi pihak ketiga. Selanjutnya Tindakan Tiongkok yang mendorong adanya konsultasi dan arbitrase juga merupakan tindakan intervensi yang seharusnya dilakukan intervensi sesuai dengan model contingency. hal inilah yang membuat Tiongkok berhasil membuat kedua belah pihak menyetujui gencatan senjata yang lebih permanen dari sebelumnya. hal ini menjadi menarik dikarenakan model contingency telah menawarkan model eskalasi konflik yang efektif dalam membuat perdamaian. sebelumnya tindakan Tiongkok belum sesuai dengan model contingency namun ketika tindakan Tiongkok sesuai dengan model contingency, intervensi yang dilakukan Tiongkok menghasilkan gencatan senjata yang permanen. Ini dapat menjadi bukti bagaimana efektifnya model contingency yang dilakukan pihak ketiga dalam mengintervensi konflik sipil.

5.2 Saran

Penggunaan Model Contingency sebagai tahap eskalasi konflik pada Third Party Intervention masih terbilang jarang. Walaupun demikian Model Contingency sangat membantu dalam menganalisis tipe intervensi yang dilakukan oleh sebuah negara salah satunya Tiongkok pada konflik sipil di Sudan Selatan. Tiongkok melakukan Intervensi ke Sudan Selatan dimulai pada tahun 2013 hingga saat ini. Namun penulis hanya membatasi permasalahan hanya pada tahun 2016 dimana Tiongkok berhasil membuat perjanjian gencatan senjata antara pihak pemberontak dan pihak pemerintah. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menganalisis tindakan intervensi yang dilakukan Tiongkok hingga pada tahun

terkini. Tindakan intervensi yang dilakukan Tiongkok ini juga merupakan hal yang baru sehingga diperlukan evaluasi yang lebih mendalam mengenai keberhasilan Tiongkok dalam mengintervensi sebagai upaya penyelesaian konflik.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Salah satu penyebabnya disebabkan oleh keterbatasan data yang peneliti hadapi. Namun, Peneliti telah berusaha untuk menyajikan penelitian ini sebaik yang bisa peneliti dilakukan dan mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian dengan topik terkait.

